



Wisuda UTDI dilaksanakan di Bale Lantip kampus setempat.

UTDI Wisuda Lulusan Siap Kerja

YOGYA (KR) - Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) yang sebelumnya bernama STMIK AKAKOM menyelenggarakan Wisuda Jenjang Magister, Sarjana dan D3 di Auditorium Bale Lantip Kampus UTDI Jalan Raya Janti (Majapahit) No 143 Yogyakarta, Sabtu (21/5). Wisuda kali ini diikuti 123 peserta terdiri 8 wisudawan prodi Magister Teknologi Informasi, 84 wisudawan prodi Informatika, 30 wisudawan prodi Sistem Informasi dan 1 wisudawan prodi Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi.

Rektor UTDI Totok Suprawoto menyampaikan, hingga saat ini UTDI sebagai pengembangan dari STMIK AKAKOM telah meluluskan 11.019 sarjana yang tersebar di dalam maupun luar negeri. Mereka bekerja sebagai ASN, BUMN, perusahaan bidang Teknologi Informasi, entrepreneur dan sebagai pendidik.

Ketua Yayasan Pendidikan Widya Bakti, Teguh Wijono Budi Prasetyo mengatakan, wisuda kali ini istimewa karena

mengawali peningkatan bentuk dari STMIK AKAKOM menjadi UTDI dan menjelang Dies Natalis ke-43.

"Perjalanan lebih 42 tahun dengan semua dinamikanya telah membawa UTDI terus berkembang dengan visi menjadi perguruan tinggi berbasis teknologi digital yang unggul dan adaptif, berbudi pekerti luhur berlandaskan Pancasila," ungkap Teguh, seraya menyebutkan, prodi-prodi yang telah ada akan terus dikembangkan baik horizontal maupun vertikal hingga mencapai jenjang S3 atau Doktor.

Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih menyebutkan, Pemda Bantul dan UTDI telah menjalin kerja sama sebagai wujud implementasi Tridarma Perguruan Tinggi yang berkontribusi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemkab Bantul.

Prof Aris Junaedi Kepala LLDIKTI Wilayah V DIY berharap kesuksesan yang diraih para wisudawan mampu menjadikan motivasi untuk segera mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan. (Sal)

SUPAYA LEBIH TINGKATKAN KUALITAS

600 PTS Kecil Sudah Lakukan Merger

JAKARTA (KR) - Sebanyak 600 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kecil kini sudah melakukan merger (penggabungan). Tahun ini, bahkan menargetkan 700 PTS kecil merger.

Demikian disampaikan Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam, Senin (23/5) di Jakarta. "Dalam 4-5 tahun terakhir ini kita terus mengakselerasi merger PTS kecil," kata Nizam.

Menurut Nizam, selain mendorong PTS untuk merger, pihaknya, juga memberikan insentif berupa bantuan fasilitas administrasi, kesekretariatan,

hingga fasilitas rapat bagi PTS. Besarnya insentif tersebut mencapai Rp 100 juta per PTS.

"Nilainya per PTS Rp 100 juta. Kalau dua, tiga PTS (yang merger) bisa sampai Rp 300 juta untuk mengakselerasi itu," tuturnya.

Nizam menyebut, pihaknya akan terus mendorong PTS kecil untuk merger. Tahun ini, 700 PTS kecil didorong untuk melakukan penggabungan. Ia

menyebut merger PTS kecil akan membawa perbaikan pada dunia pendidikan tinggi. Karena, dengan merger membuat PTS menjadi besar dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

"Kalau PTS itu besar, maka akan lebih bisa menjaga kualitas, karena dari sisi resource pasti akan lebih mencukupi untuk mengembangkan mutu. Untuk itu kita mendorong PTS-PTS yang kecil yang resourcenyanya terbatas itu bergabung, supaya menjadi PTS besar dan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas," ujar Nizam.

(Ati)

FASILITAS PENDIDIKAN BELUM MERATA

Memunculkan Problem Klasik PPDB

KARANGANYAR (KR) - Berbagai persoalan klasik jelang penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022/2023 diprediksi bakal muncul. Diantaranya, orang tua calon siswa ramai-ramai mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk mendaftar jalur afirmatif.

Sebagaimana diketahui, PPDB tahun ajaran 2022/2023 membuka jalur zonasi, afirmasi, perpindahan lokasi kerja orangtua dan prestasi. Bagi yang terhalang mendaftar sekolah dari jalur-jalur tersebut, diindikasikan memakai jalur afirmasi atau dari keluarga miskin. Pada jalur ini, orang tua harus menyerahkan surat keterangan penerima program keluarga harapan (PKH).

Anggota Komisi D DPRD Karanganyar Suprpto mengaku

khawatir modus itu masih dipakai para orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Mereka terhalang jalur lain yang kurang mengakomodir.

"Padahal mereka tidak miskin. Supaya anaknya bisa masuk sekolah, terpaksa berbuat demikian. Dinsos harus jeli jika ada usulan SK warga miskin baru jalur PPDB. Satgasin di desa dan kelurahan juga tak boleh asal-asalan mengusulkan," katanya, bari-baru ini.

Suprpto mengatakan, pemerintah seharusnya memberi solusi problem klasik PPDB yang muncul dari tahun ke tahun. Para orang tua tentu menginginkan sekolah berkualitas yang berdekatan dengan tempat tinggal. Persoalan muncul saat tak ada sekolah negeri di radius zonasi dan tak memenuhi syarat untuk mendaftari

tar dari jalur manapun.

Ia menyontokkan di Kecamatan Jaten yang tak memiliki SMA maupun SMK negeri. Akhirnya lulusan SMP yang beralamat di Jaten terpaksa memilih SMA terdekat yakni di Solo maupun di kecamatan lain di Kabupaten Karanganyar.

"Di Solo yang terdekat SMAN 1 dan SMAN 8. Itupun pakai jalur prestasi. Lha kalau nggak punya prestasi bagaimana? Terpaksa mengandalkan kuota sisa dari SMA terdekat yakni di Karanganyar Kota," katanya.

Berdasarkan perhitungan Dinas Pendidikan, daya tampung SMP di Jaten hanya 534 orang yang diakomodir SMPN 1, SMPN 2 Jaten serta SMP Muhammadiyah 9. Padahal potensi lulusan SD mencapai 1.000 orang. (Lim)

EKONOMI

ENTITAS HARUS KEMBALIKAN KERUGIAN MASYARAKAT

Lagi, Satgas Temukan 100 Pinjaman Online Ilegal

JAKARTA (KR) - Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 100 pinjaman online ilegal. Dengan demikian, sejak tahun 2018 hingga April 2022 ini, jumlah pinjaman online ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 3.989 pinjol ilegal.

"Satgas Waspada Investasi mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing, di Jakarta, Senin (23/5).

Togam juga mengatakan, selama bulan April 2022, Satgas menemukan 7 entitas pinjaman online yang melakukan penawaran investasi tanpa izin. Akibat temuan itu, maka akhir April 2022, Satgas Waspada Investasi menghentikan 7 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin, yaitu 2 entitas

melakukan money game. 1 entitas melakukan penjualan langsung tanpa izin. 2 entitas melakukan kegiatan forex dan robot trading tanpa izin. 1 entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin. 1 entitas lain-lain.

"Penanganan terhadap investasi ilegal dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Satgas Waspada Investasi dari 12 Kementerian/Lembaga. Satgas Waspada Investasi bukan aparat penegak hukum sehingga tidak dapat melakukan proses hukum. Selain menghentikan dan mengumumkan kepada masyarakat, Satgas Waspada Investasi juga melaku-

kan pemblokiran terhadap situs/website/aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri," kata Tongam.

Menanggapi beberapa informasi yang beredar di masyarakat, Satgas Waspada Investasi tidak pernah melarang penarikan dana dari para korban investasi bodong. Setiap entitas yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi diperintahkan untuk mengembalikan kerugian masyarakat.

"Satgas Waspada Investasi juga telah melakukan pemanggilan terhadap influencer yang memasarkan produk broker ilegal OctaFx, yaitu Ida Bagus Aswin P alias Gus Aswin selaku founder Tubi Indonesia. Kepada Gus Aswin, Satgas Waspada Investasi meminta untuk menghentikan segala kegiatan yang mempromosikan dan memfasilitasi broker OctaFx karena

merupakan pelanggaran hukum. Masyarakat diminta mewaspadai segala bentuk modus baru yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korban," jelas Tongam.

Satgas Waspada Investasi juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan pedagang fisik aset kripto terdaftar di Bappebti yang dapat diakses melalui website https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto dan tidak menggunakan pedagang fisik aset kripto ilegal, seperti Binance, FTX, Coinbase Exchange, Huobi, dan Kraken karena tidak memiliki izin dari Bappebti.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan serta pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id. (Lmg)

Kemenkeu Beri Keringanan Piutang 348 Debitur

JAKARTA (KR) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan memberikan keringanan utang melalui Crash Program kepada 348 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) senilai Rp 2,19 miliar. Adapun nilai outstanding sebesar Rp 9,4 miliar per 20 Mei 2022.

"Sampai Mei ini ada 348 debitur nilainya Rp 2,19 miliar. Utangnya Rp 9,4 miliar tuh," kata Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam media gathering di Jakarta, Senin (22/5).

Encep menjelaskan, debitur yang bisa mendapat keringanan utang melalui Crash Program meliputi debitur kecil yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, atau Menengah (UMKM) dengan pagu kredit maksimal Rp5 miliar. Kemudian debitur penerima kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit maksimal Rp 100 juta dan debitur dengan sisa kewajiban sebesar Rp 1 miliar. "Secara total untuk tahun ini, potensi piutang yang memenuhi kriteria program

keringanan utang ada 32.587 debitur dengan nilai piutang sebesar Rp 1,29 triliun," ujarnya seperti dikutip Antara.

Sementara potensi BKPN untuk pengkhususan yakni rumah sakit, SPP mahasiswa universitas dan piutang hingga Rp 8 juta ada sebanyak 18.738 berkas dengan nilai outstanding sebesar Rp 207,06 miliar. Sebanyak 18.738 BKPN tersebut meliputi 8.075 BKPN piutang rumah sakit dengan nilai piutang Rp 170,83 miliar, 1.115 BKPN SPP mahasiswa dengan nilai piutang Rp 9,92 miliar dan 8.165 BKPN piutang hingga Rp 8 juta dengan nilai piutang Rp 26,31 miliar.

"Seluruh debitur ini mendapat keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos atau biaya lainnya. Sedangkan untuk utang pokok, debitur mendapat keringanan sesuai ketersediaan barang jaminan dan waktu pelunasan," jelas Encep.

Secara rinci, debitur yang memiliki barang jaminan berupa tanah atau bangunan mendapatkan keringanan sebesar 35 persen dari sisa utang pokok. (Has)

Holding BUMN Farmasi Raup Rp 7,1 T

JAKARTA (KR) - Holding BUMN Farmasi yang terdiri dari Bio Farma, Kimia Farma dan Indofarma mencatatkan pendapatan konsolidasi selama kuartal pertama tahun 2022 sebesar Rp 7,1 triliun. Dibandingkan dengan periode sama pada tahun 2021, mengalami pertumbuhan sebesar 18 persen.

"Kalau kita melihat pencapaian pendapatan Holding BUMN Farmasi sampai akhir Maret 2022, pencapaian kita 99 persen dibandingkan target kuartal I tahun ini Rp 7,14 triliun dan pencapaian pendapatan kita sebesar Rp 7,1 triliun," ujar Dirut PT Bio Farma (Persero) sebagai induk Holding BUMN Farmasi Honesti Basyir dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (23/5).

Honesti mengatakan, untuk pencapaian EBITDA konsolidasi sampai dengan Maret 2022 sebesar 113 persen. Pencapaian itu cukup tinggi, namun kalau dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu memang terdapat penurunan sebesar 36 persen.

"Terkait laba bersih konsolidasi sampai akhir Maret 2022, dibandingkan dengan Rencana Kinerja Anggaran Perusahaan atau RKAP maka pencapaian Holding BUMN Farmasi cukup tinggi yakni sebesar 234 persen. Namun jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu maka hal tersebut mengalami 29 persen, dengan kondisi yang tidak jauh berbeda di mana penugasan-penugasan untuk pandemi sudah mulai turun," katanya.

Dari Bio Farma sendiri sebagai perusahaan induk atau artinya bukan sebagai holding, sampai saat ini Bio Farma masih sebagai kontributor utama dibandingkan dengan anak-anak perusahaan. Sampai Maret tahun ini pencapaian pendapatan Bio Farma sebesar 119 persen dibandingkan pertumbuhan pada periode sama tahun lalu sebesar 35 persen. Pencapaian pendapatan hingga Maret tahun 2022 ini merupakan kontribusi tetap dari penugasan vaksin pandemi Covid-19 yakni Covinac sebesar Rp 1,66 triliun. (Lmg)

Ya, Pasti Tidak Semuanya

KALI ini saya ingin bicara tentang kepemimpinan sebaiknya dijabat yang sudah senior atau yang masih junior? Dalam arti usia. Sebaiknya yang sudah agak tua penuh pengalaman atau yang muda tapi penuh pengetahuan? Pendapat masyarakat mengalami perubahan, terutama semakin banyaknya inovasi. Pendapat tentang usia seorang yang tepat untuk diangkat sebagai pemimpin juga alami perubahan.

Banyak yang ragu kalau ada orang muda menduduki jabatan tinggi. Mengapa? Karena ada pendapat, bahwa: 1. Anak muda zaman sekarang ingin segala sesuatu serba instan. 2. Tak tahan banting. 3. Mudah emosional. 4. Mudah bosan. 5. Bekerja kurang cermat karena ingin cepat. 6. Sering bertindak tanpa dirancang matang. 7. Kurang penguasaan. Bagaimana pendapat Anda? Yang pasti ada pro dan kontra.

Menurut saya, pemimpin meski masih muda, tak perlu ditolak. Mengapa? Karena yang junior, dalam hal kemampuan tak selalu kalah dengan yang senior. Justru banyak kaum muda sekarang ini punya kelebihan luar biasa. Keren dan cetaar. Iya, kan? Yuk, kita hitung kelebihan para pemimpin muda: 1. Biasanya penuh energi. 2. Berani menghadapi tantangan. 3. Lebih sensitif jika terjadi sesuatu yang berbeda. 4. Generasi muda lebih bisa ikuti kemajuan teknologi informasi. Siap up date. 5. Memiliki semangat berkata: WHAT NEXT?

Siap berinovasi tiada henti. 6. Tak berpikir AKIBAT yang merugikan, justru mampu menemukan solusi yang tepat & cepat. 7. Last but not least: memang tak semua orang muda memiliki kriteria seperti diatas.

Tapi generasi senior juga tak sedikit yang bersikap statis. Merasa sudah cukup berpengalaman. Tidak bersemangat climber, yaitu yang berhenti sebelum tiba di Puncak. Banyak yang statis. Merasa di zona nyaman. Bermental quitters, cepat berhenti karena puas. Atau campers yang mendaki tapi lalu berkemah. Berbeda dengan climbers. Ingin terus mendaki. Tak berhenti sebelum tiba di puncak. Eeeiitss...ada yang protes nih. Jangan dipukul rata! Pasti ada pengecualian. Para pakar juga berpendapat demikian. Memang ada pengecualian. Iya, kan? YA, PASTI TIDAK SEMUANYA!